

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan memiliki laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan dan arus kas yang dapat membantu stakeholders dalam mengambil keputusan ekonomi (Dwijayani et al., 2019). Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan alat komunikasi perusahaan mengenai data keuangan atau aktivitas operasional perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan (Kayoi, 2019). Laporan keuangan yang tidak memberikan informasi dengan benar dan akurat akan menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Akan tetapi, beberapa pihak pelaku bisnis melakukan *fraud* atau kecurangan dalam laporan keuangan untuk menampilkan gambaran kondisi keuangan yang terbaik sehingga dapat menarik keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2014) berdasarkan frekuensi tindakan kecurangan yang terjadi, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan tindakan kecurangan yang memiliki frekuensi tertinggi disusul oleh korupsi (*corruption*) dan yang terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Tetapi *financial statement fraud* adalah jenis kecurangan / *fraud* yang

memiliki dampak kecurangan yang paling merugikan diantara jenis kecurangan lainnya (Yesiariani & Rahayu, 2016). Kecurangan adalah tindakan penipuan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan tidak adil atau illegal.

Menurut Ijudien (2018) menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan berkaitan erat dengan tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen memiliki peran penting bagi perusahaan yaitu bertanggungjawab dalam mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham (*stakeholder*), namun manajer memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi. Perbedaan kepentingan inilah yang mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Pada teori *Fraud Triangle* mengemukakan 3 hal-hal yang dapat menyebabkan kecurangan (1) Tekanan, adalah kondisi pada saat seseorang merasa tertekan dalam memenuhi target yang harus dicapai dari pihak-pihak yang berkepentingan, (2) Peluang, adalah suatu kondisi digunakan oleh seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Peluang muncul dari keadaan pengendalian internal yang lemah, pengawasan yang tidak memadai dan individu yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, (3) Rasionalisasi, merupakan kondisi dimana pelaku kecurangan berusaha menunjukkan bahwa apa yang dilakukan adalah benar sebelum melakukan penipuan (Cressey, 1953).

Skandal keuangan merupakan masalah sosial dan bentuk pertanggungjawaban yang menyebabkan penurunan nilai pasar dan mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran

tentang tindakan kecurangan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2020) menyebutkan bahwa industri keuangan dan perbankan adalah industri dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak, yakni sebesar 386 kasus dengan rata-rata kerugian mencapai \$100,000. meskipun telah menggunakan teknologi tinggi (*computerized*) namun sulit terdeteksi jika terjadi kolusi antara oknum karyawan bank dengan pihak lain. Misalnya kasus kecurangan laporan keuangan juga dilakukan oleh Bank Bukopin Tbk. Manajemen Bank Bukopin secara terbuka telah merevisi laporan keuangan pada tahun 2015 hingga 2017. Perevisian laporan keuangan Bank Bukopin terjadi pada laba bersih yang didapatkan pada 2016 yang semula Rp 1,08 triliun menjadi hanya Rp 183,56 milyar. Pendapatan komisi dan provisi merupakan pendapatan yang banyak direvisi oleh pihak manajemen. Dibandingkan dengan perolehan pendapatan yang lain, pendapatan ini direvisi dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp 148,6 miliar. (Detik.com, 2018). Tindakan manipulasi laba pada Bank Bukopin Tbk dipengaruhi dengan ekspektasi para pemegang saham atau investor karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total laba yang dimiliki perusahaan tersebut, perputaran uang semakin banyak. Perevisian yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Bukopin Tbk yaitu mengecilkan laba untuk menutupi kerugian yang dialaminya.

Kasus *Fraud* yang terjadi di dunia perbankan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun baik pihak eksternal maupun pihak internal sektor perbankan itu sendiri. Mengetahui ukuran perusahaan dan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari praktik curang/ tindakan ilegal yang dilakukan untuk mencari keuntungan semata.

Ukuran perusahaan merupakan mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam bentuk, perusahaan yang berukuran besar dan perusahaan berukuran kecil. Ukuran perusahaan disini sangat mempengaruhi terjadinya manipulasi laba karena semakin besar suatu perusahaan harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang. Prasetyo (2014) berpendapat bahwa ukuran perusahaan dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Menurutnya ketika semakin kecil aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka secara efektif dapat mengurangi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan, sebaliknya semakin tinggi asset perusahaan maka secara efektif meningkatkan kecurangan laporan keuangan. Menurut Hilmi dan Ali (2008) ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja, kapitalisasi pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan sebagainya. Semakin besar kapitalisasi pasar menandakan semakin perusahaan diketahui oleh

masyarakat, semakin besar penjualan menandakan perputaran uang semakin banyak, dan semakin besar aktiva menandakan modal yang ditanam semakin banyak. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi ukuran perusahaan. Pemilihan total aset dikarenakan total aset relatif lebih stabil daripada ukuran lain untuk menilai ukuran perusahaan (Murdoko Sudarmadji, Ardi and Sularto (2007).

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN ataupun swasta. Khususnya bagi emiten yang memiliki kewajiban transparansi informasi kepada publik, terutama investor sahamnya seperti Bank. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Good Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Sari et al., 2015). Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan dan memperkecil potensi terjadinya kecurangan.

Good Corporate governance memiliki empat faktor yaitu komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Surya dan Yustivandana, 2008). Kepemilikan institusional sangat berperan

dalam mengawasi perilaku manajer sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga dengan baik. Roberts (2009) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau *monitoring* yang lebih ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan kepentingan investor institusional menjadi semakin besar dalam entitas tersebut sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang semakin besar dalam suatu perusahaan akan mengurangi probabilitas terjadinya *fraud* pada laporan keuangan (Anggara, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Salim (2017) menunjukkan yaitu kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apabila pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi didalam manajemen (Dian, 2014). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo (2016), menguji kepemilikan manajerial terhadap kecurangan pelaporan keuangan yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan insentif manajemen kepada para pemegang saham dan manajer yang memiliki saham, maka mereka lebih cenderung membuat keputusan yang terbaik untuk

semua pihak sehingga akan memungkinkan meminimalisir tindakan kecurangan.

Prinsip GCG diperlukan untuk mencegah potensi terjadinya fraud pada perusahaan maupun organisasi sektor publik. Prinsip GCG adalah bentuk kode etik yang digunakan untuk mencegah organisasi dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum (Soleman, 2013). Tujuan dari GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak stakeholder. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) *Good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pihak *stakeholder* dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2004:49).

Hasil Penelitian Prasetyo (2014) berpendapat bahwa ukuran perusahaan dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya Handoko, Ramadhani, dan Nusantara (2017), Arimbi (2015) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak berhubungan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian Zeyn (2011) menunjukkan bahwa aplikasi *good corporate governance* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta dapat menurunkan terjadinya kecurangan (*Fraud*). Menurut (Fitratul Jannah, 2016) penerapan *good corporate governance* yang sangat baik dapat mencegah kecurangan. Temuan yang mendukung lainnya diperoleh

oleh penelitian (Kurniawan & Izzaty, 2019) menemukan bahwa penerapan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya *fraud*, begitupun sebaliknya jika perusahaan tidak menerapkan *good corporate governance*, kemungkinan terjadinya *fraud* akan lebih besar karena pengoperasian manajemen tidak berjalan secara profesional, transparan, dan tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan kepada uraian ringkasan fenomena penelitian dan beberapa hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Priswa & Taqwa (2019). Perbedaan dalam penelitian ini ukuran perusahaan dan *good corporate governance* yang mempengaruhi variabel dependen. Selain itu penelitian ini dilakukan dalam periode waktu yang lebih panjang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini berjudul : **Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Laporan Keuangan.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang masalah maka dapat diajukan beberapa pertanyaan yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fraud* laporan keuangan ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *fraud* laporan keuangan ?

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *fraud* laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian perumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fraud* laporan keuangan.
2. Membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *fraud* laporan keuangan.
3. Membuktikan dan menganalisis secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *fraud* laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan uraian perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan beberapa manfaat :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* Laporan Keuangan. Manfaat bagi peneliti dapat menambah pengalaman ilmu yang penulis peroleh dari sebuah pengalaman penelitian.

2. Bagi Objek di Teliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada manajemen perusahaan yang mana dijadikan

pertimbangan dalam mengetahui ukuran perusahaan dan menerapkan *good corporate governance*.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mahasiswa jurusan akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, pedoman, maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* Laporan Keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Pada bab ini menjelaskan tentang teori penelitian, penurunan hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran, metode pengujian hipotesis dan evaluasi pengujian.